

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hak mendasar bagi setiap individu, yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup layanan yang disediakan oleh pemerintah baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal kepada masyarakat dan sekolah, serta layanan yang diberikan oleh sekolah kepada siswa dan keluarga mereka, bersama dengan bimbingan dan pengajaran yang diberikan oleh para pendidik kepada siswanya (Hasbullah, 2015). Pendidikan juga merupakan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, serta pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang Pasal 31 tahun 1945).

Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Melalui pendidikan yang mencukupi manusia dapat hidup dengan layak seperti apa yang diharapkannya. Tentunya harapan tersebut adalah hal yang lebih baik dari keadaan yang dijalani sekarang (Hasbullah, 2015). Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memeberikan pencerahan dan sekaligus perubahan pola hidup. Pencerahan

diperlukan sebagai satu usaha sadar untuk menjadikan kita sebagai sosok penting dalam kehidupan, dan perubahan yang dimaksud adalah untuk mempersiapkan kita sebagai sosok yang mampu menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan (Mohammad Saroni, 2013).

Kebijakan pendidikan sebagai proses dan hasil perumusan langkah strategis dari lembaga pendidikan dijabarkan dari visi, misi, tujuan dan sasaran pendidikan, dalam mewujudkan tujuan pendidikan di suatu masyarakat pada kurun waktu yang ditentukan (Hasbullah, 2015). Kebijakan pendidikan merupakan suatu pertimbangan didasarkan pada sistem nilai serta beberapa faktor bersifat situasional. Pertimbangannya dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pendidikan bersifat melembaga. Kebijakan pendidikan tentunya menjadi faktor kunci bagi keunggulan, dan eksistensi Negara dalam kompetisi global, sehingga kebijakan pendidikan penting mendapatkan prioritas utama untuk ditelaah secara kritis dan komprehensif (Prasojo, 2011).

Salah satu upaya pemerintah dalam kebijakan pendidikan untuk mencapai tujuan negara dan meningkatkan kualitas masyarakat adalah Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Program ini bermaksud untuk memutus rantai angka putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak yang telah terdaftar mengikuti program Indonesia Pintar yang kriterianya merupakan anak usia 6-21 tahun dan berasal dari keluarga tidak mampu. Berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1, "Program

Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantua Siswa Miskin (BSM)". Uang tersebut ditujukan untuk meringankan pembayaran uang sekolah, pembelian buku dan alat tulis sekolah, alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll pembelian pakaian/seragam), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa/ iuran bulanan siswa, biaya kursus/les tambahan, keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah.

Kebijakan bantuan untuk warga miskin sudah tercatat dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara" dan di dalam pasal 34 ayat 2 juga dijelaskan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia". Dari pernyataan tersebut pemerintah sudah mengusahakan berbagai macam program-program diantaranya, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) namun diantara semua program tersebut masih saja dianggap kurang efektif untuk menanggulangi permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Tak berhenti di situ pemerintah mengupayakan penyelesaian masalah kemiskinan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam wujud bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Semua warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, namun tidak semuanya memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendidikan itu sendiri. Maka dari sini kita dapat melihat bahwa tujuan pemerintah

dalam menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia belum tercapai sepenuhnya. Faktor yang kurang mendukung tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah masalah kemiskinan yang membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam menjangkau pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi halangan bagi masyarakat menengah kebawah dalam mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang terus meningkat menjadikan mereka lama kelamaan kewalahan membayarnya. Hal ini tentu saja menjadikan mereka tidak mampu mengikuti proses pendidikan hanya karena kemampuan finansialnya tidak mencukupi. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi (Herlina, 2017).

Kesempatan warga miskin untuk mendapatkan pendidikan pun nampaknya masih belum merata. Hadi Supeno (1999) menyatakan bahwa pendidikan yang dulunya begitu mulia, yakni melepaskan rakyat dari cengkeraman kemelaratan, kini telah menjadi alat dari sistem masyarakat kapitalis. Pendidikan hanyalah milik mereka yang berduit, dan mereka yang berasal dari kelas menengah dan atas. Pendidikan telah menjadi barang mewah, dengan harga yang begitu mahal. Pasal 34 UUD 1945 telah menjamin bahwa fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kalimat tersebut jika kita kaji pada tataran empiris sehari-hari hanyalah sebuah cita – cita yang tidak tahu sampai kapan akan merata sampai pada lapisan masyarakat paling bawah khususnya masyarakat miskin. Muhammad Saroni (2013) menyebutkan bahwa para elite politik di tingkat pusat maupun daerah

masih bergelut pada kepentingan masing – masing sehingga kepentingan kaum miskin yang menjadi amanat tugas mereka malah terabaikan. Akibatnya, kaum miskin terpaksa berjuang sendiri berhadapan dengan dinamika kehidupan yang memperlihatkan muka tak ramah di hadapan mereka.

Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Menurut Muhammad Saroni (2013) menyatakan bahwa mereka adalah masyarakat yang sering menjadi korban dari biaya pendidikan yang terus melangit. Masyarakat kelompok lapisan ini sering harus rela menjadi penonton di pinggir lapangan pendidikan sebab tidak mampu membeli karcis untuk kursi penonton yang nyaman. Mereka tidak mampu mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Hal ini tentu saja menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang dikecewakan oleh kondisi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah orang miskin di Indonesia Maret 2016 – Maret 2022 disajikan sebagai berikut



Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2016-2021

Sumber : (BPS, 2022)

Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin tercatat 29,25 juta orang (11,96%). Setahun kemudian, Maret 2017, jumlahnya turun menjadi 28,17 juta orang (11,36%). Maret 2018, jumlah penduduk miskin sedikit meningkat menjadi 28,28 juta orang, meski persentasenya turun menjadi 11,25%. Pada Maret 2019, jumlahnya naik lagi menjadi 28,59 juta orang, dengan persentase 11,22%. Memasuki Maret 2020, jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 28,01 juta orang (10,86%). Hingga Maret 2021, jumlah penduduk miskin tercatat 27,77 juta orang, atau 10,64% dari total populasi. Secara keseluruhan, tren penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan (Data Kemiskinan RI 5 tahun terakhir, 2022).

Salah satu kota di Jawa Timur yang dijuluki sebagai kota Pendidikan yakni Kota Malang. Akan tetapi tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Malang sangat memprihatinkan dengan total 5.655 kasus. Sebagian besar dari anak-anak ini, sebanyak 1.875 orang, putus sekolah (DO). Sementara itu, 1.271 anak menghentikan pendidikan mereka sebelum menyelesaikannya, dan 2.595 anak belum pernah terdaftar di sekolah atau tidak memiliki pengalaman pendidikan formal (BPB). Masalah ini terutama terlihat pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), di mana angka putus sekolah paling tinggi terjadi (Almutoif, 2024).

Beberapa kasus putus sekolah memang terkait dengan faktor ekonomi, seperti banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah pada usia sekolah. Namun banyak faktor lain yang menjadi penjas putus sekolah, seperti ketersediaan akses dan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau. Saat ini, kita juga dihadapkan pada fenomena meningkatnya putus sekolah pada anak karena kejadian kehamilan yang tidak dikehendaki pada anak-anak. Kajian yang lebih

komprehensif perlu dilakukan untuk menjawab akar persoalan dari angka putus sekolah ini. Tetap dibutuhkan upaya pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah ini dalam rangka mencapai pemerataan pendidikan khususnya di Kota Malang (Laporan kinerja Pemkot Malang tahun 2022).

Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kota Malang tahun 2022 mencapai 38,48 ribu jiwa (4,56 persen), bertambah 1,1 ribu jiwa dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 37,38 ribu orang (4,34 persen). Garis kemiskinan Kota Malang dilihat dari pendapatan juga mengalami kenaikan dari Rp.522.691,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 543.929,-, di tahun 2022. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 0.67 persen (0.01 persen poin) dibandingkan tahun 2021 (0.68 persen). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di tahun 2022 sedikit penurunan menjadi 0.14 persen (turun 0.02 persen poin) dibandingkan tahun 2021 (0.16 persen) (BPS Kota Malang, 2022).

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan

karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja.

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas.

Fenomena yang terjadi salah satunya adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana KIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP. Padahal seharusnya pemerintah meluncurkan program ini adalah diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama. Fungsi dari dana KIP adalah pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa/ iuran bulanan siswa, biaya kursus/les tambahan, keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah.

Bantuan keuangan yang disalurkan melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar) berbeda pada setiap jenjang pendidikan, mencerminkan upaya pemerintah untuk mendukung siswa dan mendorong minat belajar yang lebih besar. Idealnya, bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh para penerimanya. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan muncul, seperti ketidaksesuaian antara jumlah siswa yang mencairkan dana dengan jumlah siswa yang sebenarnya memenuhi syarat untuk menerimanya. Hasil penelitian (Yosevina et.al, 2022) mengungkap beberapa faktor penyebab, di antaranya: 1) seringnya perubahan dalam proses penyaluran bantuan; 2) salah sasaran dana yang diterima oleh siswa dari keluarga mampu, sementara banyak siswa dari keluarga kurang mampu tidak terdaftar; 3) ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan pedoman teknis yang dikeluarkan pemerintah; 4) pemanfaatan dana bantuan yang kurang efisien atau tidak tepat sasaran; dan 5) campur tangan politik lokal, serta kesulitan dalam memantau penggunaan dana KIP yang sesuai.

Menurut Dian Ferdina Nasution (2017), program KIP belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya siswa yang belum menerima Kartu Indonesia Pintar, kurangnya partisipasi bank dalam penyaluran dana yang menyebabkan pelaksanaan program terlambat, serta lambatnya proses penyaluran dana oleh bank yang menyebabkan dana KIP tidak sampai tepat waktu kepada penerima. Sementara itu, penelitian Mutia Irene Situmorang (2022) menunjukkan bahwa penggunaan KIP sudah efektif. Penelitian ini menemukan bahwa responden penerima KIP telah memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik, menunjukkan bahwa program ini berhasil dalam memperkuat jaminan pendidikan bagi penerimanya.

Di sisi lain, Lilian Haning Tyas (2022) menyatakan bahwa meskipun sudah ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk program KIP, di lapangan masih ada ketidaksesuaian dalam pemanfaatannya. Beberapa penerima bantuan menggunakan dana KIP tidak sesuai dengan petunjuk yang ada. Selain itu, pelaksana program menilai bahwa sebagian penerima sudah tepat sasaran, namun ada juga yang belum tepat sasaran, yang mencerminkan adanya ketidaksesuaian dalam efektivitas program di lapangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan terbaru peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Pendidikan di Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Pendidikan di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Pendidikan di Kota Malang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Bermanfaat sebagai salah satu bahan kajian pada studi Pendidikan, khususnya terkait tentang efektivitas program kartu Indonesia pintar (KIP) dalam meningkatkan pendidikan anak bersekolah
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema relevan serta sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sumber wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas program kartu Indonesia pintar (KIP) dalam meningkatkan pendidikan anak bersekolah di Malang.

b. Bagi Instansi Terkait

Sebagai rekomendasi kebijakan atau efektivitas program mengenai Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan pendidikan anak bersekolah.

E. Definisi Konseptual

1. Efektivitas

Menurut Mardiasmo dalam Sumenge (2013) “Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna)”. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Menurut Siagian (2003), efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Efektivitas adalah taraf tercapainya satu tujuan yang telah ditetapkan, Salim dalam Molaga (2015) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional”. Menurut Gie dalam Budiani (2009) “Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya”. Sesuai dengan definisi yang sudah dipaparkan beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas ialah adanya hasil dari sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional, jadi dapat dikatakan efektif jika suatu program atau tujuan maupun tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik.

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana program tersebut dapat berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Jones dalam Ponto (2016), program

adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Keefektifan suatu program dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, maka ukuran efektivitas menjadi acuan dalam melakukan analisis suatu kegiatan atau program yang telah terlaksana. Efektivitas suatu program dapat diukur dengan cara menggunakan berbagai indikator berdasarkan konsep dan teori yang ada. Adapun indikator Efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini (Sutrisno dalam Janah, 2016) yakni:

a. Pemahaman program

Pemahaman program melibatkan evaluasi tentang seberapa efektif program KIP membantu semua pihak yang terlibat untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka, sekaligus memastikan masyarakat memahami tujuan dari program yang dilaksanakan. Untuk mencapai hal ini, para pejabat pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan memastikan bahwa informasi mengenai program tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat secara merata dan menyeluruh.

b. Tepat sasaran

Tepat sasaran adalah faktor kunci dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program. Penting untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada akhirnya, keberhasilan program bergantung pada seberapa efektif program tersebut mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Tepat waktu

Tepat waktu berarti menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini merupakan hasil dari efisiensi dan koordinasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atau kolaborator dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

d. Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan yaitu sejauhmana tujuan program KIP yang telah disepakati bersama dapat terealisasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sejauh mana hasil pelaksanaan program KIP sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika tujuan tersebut tidak tercapai dengan baik maka dikatakan tidak efektif dan apabila tujuan tersebut telah tercapai dengan baik maka dapat dikatakan efektif.

e. Perubahan nyata

Perubahan nyata berkaitan dengan sejauh mana program KIP menciptakan dampak yang terlihat dan bermakna bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan program dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, perubahan ini juga mengevaluasi apakah para pemangku kepentingan dapat merasakan manfaat atau perubahan positif dari pelaksanaan program tersebut.

2. Kebijakan Publik

Chaizi Nasucha dalam Harbani Pasolong (2008), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Menurut Wiliam N. Dunn dalam (Harbani Pasolong 2011:29) kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang menyangkut tugas pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, 15nergy, kesehatan, pendidikan kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

3. Kartu Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Program Indonesia pintar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Implementasi PIP merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sekaligus untuk mendorong implementasi Pendidikan Menengah Universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan hasil dari Program Indonesia Pintar, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip yakni

efisien: Diusahakan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang singkat dan dapat dipertanggungjawabkan, efektif: Harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, transparan: Menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP, akuntabel: Pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan, Kepatutan: Penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional, dan manfaat: pelaksanaan program atau kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

4. Kualitas Pendidikan

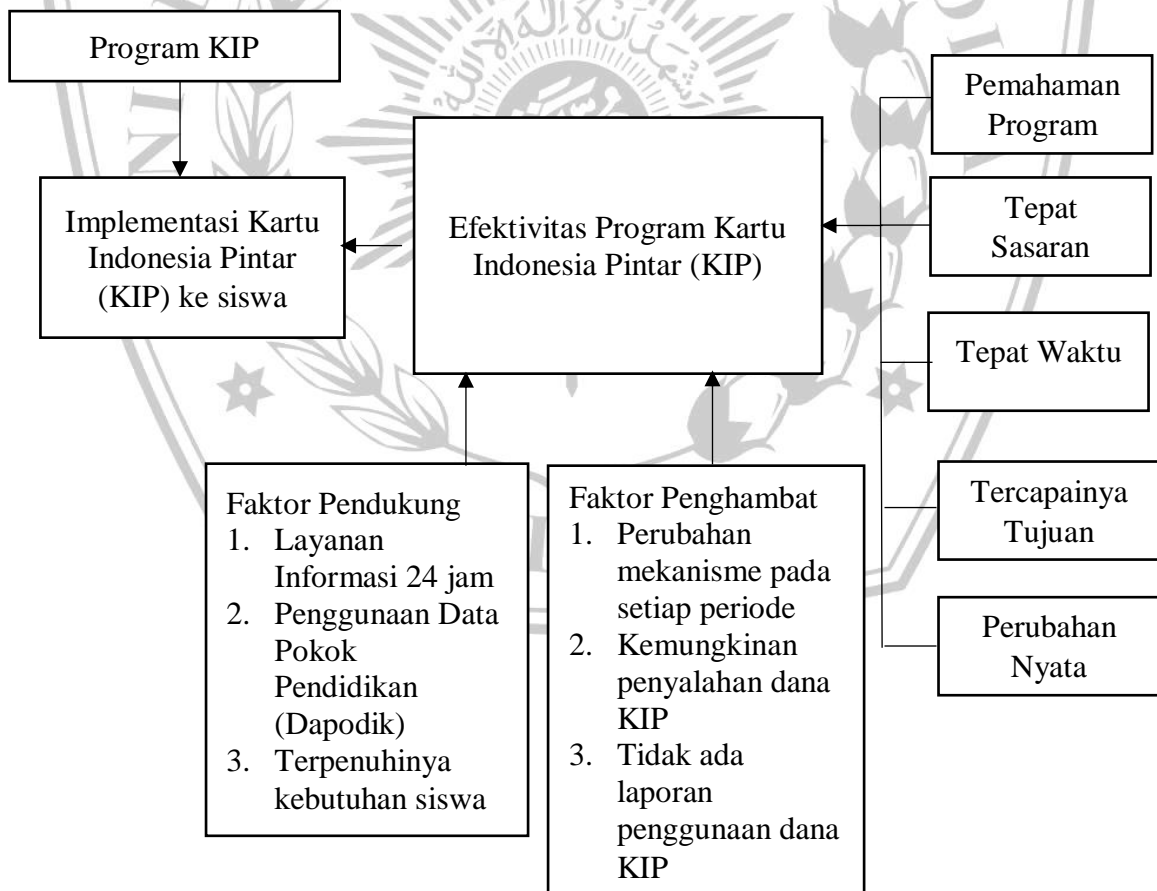
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan nasional memiliki tujuan yang jelas seperti yang tercantum dalam undang-undang pendidikan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab

kemasyarakatan dan kebangsaan. Selaras dengan pendapat Tilaar (2009) yang menyatakan bahwa “Tujuan pendidikan nasional dalam rangka ini adalah suatu proses pemerdekaan manusia Indonesia. Sebagai bangsa yang merdeka dia tidak akan hanyut dari arus globalisasi ataupun hanya berpangku tangan dan bersikap masa bodoh terhadap perubahan-perubahan yang besar di dalam kehidupan sehari-hari tetapi merupakan seorang pribadi yang sadar akan identitasnya sebagai bangsa Indonesia”.

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka peneliti menyusun bagan kerangka berfikir:



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

Sumber : (diolah penulis, 2024)

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah digambarkan diatas bahwasanya Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Program Indonesia pintar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program akan tercapai apabila indikator-indikator efektifitas menurut Sutrisno dalam Janah (2016) dalam suatu program yakni Pemahaman program, Tepat sasaran, Tepat waktu, Tercapainya tujuan, dan Perubahan nyata dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambat, yakni untuk faktor pendukung adalah Layanan Informasi 24 jam, Penggunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan Terpenuhinya kebutuhan siswa. Sedangkan untuk faktor penghambat yakni Perubahan mekanisme pada setiap periode, Kemungkinan penyalahan dana KIP, dan Tidak ada laporan penggunaan dana KIP.

G. Definisi Operasional

1. Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak SMP di Kota Malang.

- a. Pemahaman program kartu indonesia pintar (KIP) dalam meningkatkan Pendidikan anak SMP di Kota Malang
- b. Ketepatan sasaran program kartu Indonesia pintar (KIP) meningkatkan Pendidikan anak SMP di Kota Malang.
- c. Ketepatan waktu program kartu Indonesia pintar (KIP) meningkatkan Pendidikan anak SMP di Kota Malang.

- d. Tercapainya tujuan program kartu Indonesia pintar (KIP) meningkatkan Pendidikan anak SMP di Kota Malang
- e. Perubahan nyata adanya program kartu indoensia kartu Indonesia pintar (KIP) meningkatkan Pendidikan anak SMP di Kota Malang

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar bagi siswa SMP di Kota Malang

a. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP):

- 1) Layanan Informasi 24 jam yang disediakan oleh Dinas Pendidikan terkait.
- 2) Penggunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang peneliti dapatkan dari Dinas Pendidikan terkait.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan siswa setelah menerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

b. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP):

- 1) Perubahan mekanisme dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada setiap periode.
- 2) Kemungkinan penyalahgunaan dana dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- 3) Tidak ada laporan penggunaan dana dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, yang berjudul Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Pendidikan di Kota Malang, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena topiknya bersifat deskriptif dan memerlukan analisis teoretis, yang akan memandu penelitian dengan mengamati situasi kehidupan nyata. Menurut Creswell (2019), penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali makna suatu fenomena dengan melihatnya dari sudut pandang para peserta penelitian. Ada beberapa ciri-ciri dari penelitian kualitatif dalam (Pasolong, 2012) diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Lapornya sangat deskriptif yaitu menjelaskan data-data yang diperoleh apa adanya (bukan apa yang dipikirkan oleh peneliti).
- b. Penelitinya sebagai instrumen (key instrument).
- c. Mencari makna, dipandang dari pikiran dan perasaan responden.
- d. Mementingkan data langsung (tangan pertama) oleh sebab itu pengumpulan datanya mengutamakan observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi.
- e. Menggunakan Triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran data yang diperoleh kepada pihak lain.
- f. Menonjolkan rincian yang kontekstual, yaitu menguraikan sesuatu secara rinci tidak terkotak-kotak.
- g. Subyek yang diteliti dianggap berkedudukan yang sama dengan peneliti, peneliti bahkan belajar dari narasumber/informan.

- h. Mengutamakan perspektif emic, yaitu pendapat responden dari pada peneliti sendiri (etic).
- i. Sampel dipilih secara purposive atau menunjuk langsung informan yang betul-betul menguasai.
- j. Menggunakan audit trail, yaitu memeriksa data mentah, analisis dan kesimpulan kepada pihak lain, biasanya pembimbing.
- k. Analisis data dilakukan sejak awal sampai penelitian berakhir.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ada di penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak SMP di Kota Malang” sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif di dalam penelitian ini, peneliti dapat mengetahui, menjelaskan serta memaparkan sebuah analisa dari hasil penelitian yang dilaksanakan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian yaitu tempat dimana penelitian menangkap adanya suatu fenomena dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni di SMP di Kota Malang dengan SMP Negeri 2 Malang dijadikan lokasi penelitian yang beralamat di Jl. Prof. Moch Yamin No.60, Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65118, peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan penerima jumlah KIP yang ada pada sekolah SMP Negeri 2 Malang lebih banyak daripada sekolah yang lain.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud peneliti yaitu menunjukkan dari mana mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, baik berupa benda atau orang. Menurut Lofland dalam (Moleong, 2014) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah, kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan gambaran hasil statistik.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini, agar diperoleh hasil penelitian yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data penelitian akan dibagi menjadi dua bagian dalam (Moleong, 2013) yaitu:

a. Data primer

Jenis Data Primer adalah jenis data yang secara langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Jenis data primer pada penelitian ini berupa catatan hasil wawancara yang penulis lakukan yang berkaitan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi di lokasi penelitian, data-data mengenai informan, serta penulis juga melakukan observasi dengan mengamati fenomenologi yang terjadi di lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian dilapangan. Sedangkan sumber data merupakan asal usul dari data yang ingin diperoleh guna menjawab fokus dari penelitian ini, dalam hal ini sumber data dari penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala sekolah SMP Negeri 2 Malang
- 2) Guru dan Koordinator KIP SMP Negeri 2 Malang
- 3) Peserta didik penerima KIP di SMP Negeri 2 Malang

4) Orang Tua dari peserta didik penerima KIP di SMP Negeri 2 Malang.

b. Data sekunder

Jenis data sekunder merupakan jenis data yang tidak memberikan informasi secara langsung terhadap pengumpul data (Sugiyono, 2014), berdasarkan pengertian diatas jenis data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung yang dapat diperoleh melalui arsip, dokumen, bahan pustaka, penelitin terdahulu, maupun laporan yang mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Gambaran umum Kota Malang
- 2) Gambaran umum struktur organisasi SMP Negeri 2 Malang
- 3) Data penerima KIP di SMP Negeri 2 Malang

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam melakukan penelitian untuk pengumpulan data, yang dimana tujuan penelitian untuk mendapatkan data yang digunakan. Tanpa mengetahui standar data yang diterapkan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan untuk pengumpulan data yang dimana peneliti melakukan tatap muka dan wawancara dengan informan secara langsung untuk mendapatkan data dari informan secara faktual yang dimana pertanyaan tersebut berkaitan dengan persoalan yaitu peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi lulusan. Peneliti menetapkan informan atau narasumber, antara lain:

Tabel 1.1
Informan Wawancara

| Narasumber | Status | Jumlah |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| Ibu Riatiningsih, S.Pd.,M.M | Kepala Sekolah | 1 |
| Ibu Nike Kusumawati M.Pd | Guru dan Koordinator KIP | 1 |
| Fatimah Nafisa Azraq | Siswa Penerima KIP | 2 |
| Gamar Rasty Humairo | | |
| Ibu Latifah Yahya | Orang Tua Siswa Penerima KIP | 2 |
| Ibu Istiqomariah | | |

Menurut Yusuf (2014) menegaskan bahwa wawancara jika ditinjau dari bentuk pertanyaan yang diajukan maka wawancara dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu diantaranya:

- 1) Wawancara terencana-terstruktur.
- 2) Wawancara terencana-tidak terstruktur.
- 3) Wawancara bebas.

Berdasarkan penjelasan di atas jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan jenis wawancara “terencana-tidak terstruktur” dimana peneliti dalam hal ini menyusun sesuai rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan baku. Tujuan dari wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan yang lebih bersifat terbuka, serta dapat membuat pihak informan diminta untuk berpendapat, dan mengeluarkan semua ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses rekam jejak dari kegiatan penelitian yang peneliti lakukan, dalam pelaksanaan pencarian dokumentasi cara untuk memperoleh data dengan mempelajari, mencatat atau membuat salinan dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan objek atau permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan dokumentasi, peneliti membagi dua cara untuk mendapatkan dokumentasi yang mendukung proses penelitian ini yaitu secara online and offline. Dengan artian dengan cara online dokumentasi didapatkan dalam bentuk softcopy melalui situs atau web resmi yang bersangkutan pautan dengan judul penelitian ini, sedangkan dokumentasi secara offline didapatkan dalam bentuk hardcopy melalui dokumen-dokumen yang menunjang penelitian ini.

5. Instrumen Penelitian

Suatu penelitian memerlukan instrumen dalam pelaksanaannya. Instrumen peneliti meliputi alat-alat bantu yang digunakan untuk mengenali data dalam penelitian, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian kuantitatif, manusia (peneliti) sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya (Moleong, 2013). Hal tersebut sesuai dengan (Sugiyono, 2012) yang mengemukakan instrumen penelitian merupakan semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki, suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Dari semua

alat yang bisa untuk mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan dalam mengukur nilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah:

a. Peneliti sendiri

Instrumen yang terakhir adalah instrumen peneliti sendiri, yang bahwasanya instrumen peneliti sendiri sangat penting dalam proses berjalannya suatu penelitian untuk pengumpulan data. Dalam menjalankan instrumen penelitian sendiri yang digunakan ialah panca indra untuk melakukan pengamatan langsung dilapangan dan mencatat proses pengamatan dilapangan terhadap fenomena-fenomena yang ada selama melakukan penelitian.

b. Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Adanya peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sendiri sepertinya sangat menunjang fasilitas secara personal/priadi seperti Konektivitas Internet, Laptop, PC/Komputer dan Gadget atau ponsel. Yang dimana alat-alat perangkat tersebut sangat menunjang unsur instrumen penelitian sebagai penggalan data yang dibutuhkan secara online pada dapodik untuk mengumpulkan data. Dan penggunaan beberapa perangkat alat tersebut sangat berfungsi sebagai dokumentasi yang dapat menyesuaikan objek yang diamati oleh peneliti dan penting untuk didokumentasikan guna mendukung atau memperkuat data yang ada sebagai bukti dilakukannya penelitian.

c. Peralatan Pencatatan

Peralatan pencatatan juga alat pendukung instrumen yang dilakukan dalam sebuah penelitian, seperti yang kita ketahui peralatan pencatatan yang

digunakan meliputi (pensil, Bulpoin, Kertas, Buku dan Daily Note). Adanya peralatan dari pencatatan tersebut berfungsi sebagai alat membantu untuk mencatat data datau objek yang diperlukan saat peneliti melakukan penelitian lapangan.

6. Uji Keabsahan Data

Sugiyono (2015) memaparkan bahwa keabsahan data merupakan kepastian antar data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan peneliti. Dengan hal ini menjelaskan bahwa data yang valid merupakan data yang tidak memiliki perbedaan dengan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Untuk melakukan keabsahan data, penelitian kualitatif menggunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

a. Derajat Kepercayaan (credibility)

Teknik kreadibilitas atau kepercayaan terhadap data merupakan teknik dalam keabsaahan data yang bersumber dari penelitian kualitatif dengan melakukan perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Perpanjangan pengamatan dilakukan peneliti guna memperdalam analisis fenomena yang terjadi selama berlangsungnya penelitian di instansi terkait seperti kegiatan, proses, dan alur dari kebijakan tersebut, serta triangulasi dilakukan dengan perolehan sumber data seperti dokumen-dokumen, gambar serta catatan pengamatan langsung yang menunjang berjalannya proses penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara memverifikasi data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

b. Kepastian (Confirmability)

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji kepastian (confirmability) penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji kepastian (confirmability) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Dengan hal ini peneliti melakukan verifikasi data melakukan sinkronisasi atas pedoman dasar yang peneliti dapatkan dan konfirmasi temuan yang ada dilapangan dengan cara memastikan kembali pada informan terkait, dengan bertujuan untuk mendapatkan validitasi data yang menjadikanya hasil penelitian yang pasti.

c. Transferability

Teknik Transferability merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif, dimana peneliti harus memberikan uraian yang rinci dan jelas atas penelitian tersebut dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan hal tersebut dengan mengupayakan membuat laporan hasil penelitian dengan rinci dan jelas.

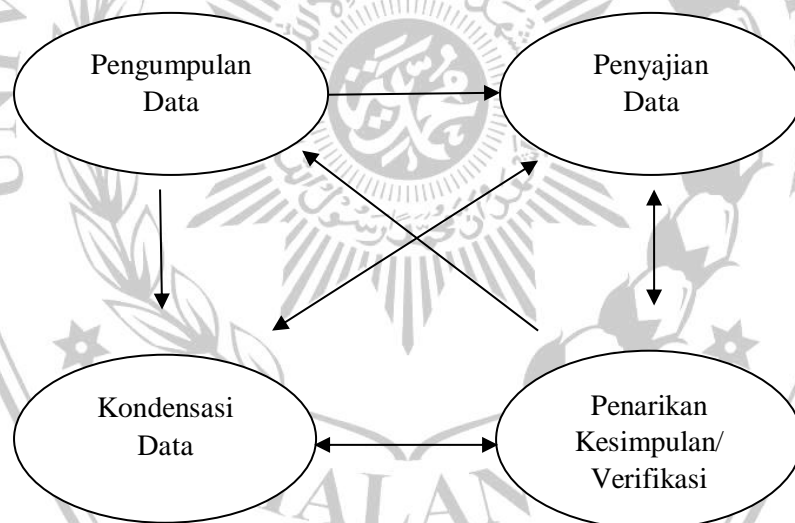
d. Jejak Aktivitas Lapangan (Depenability)

Merupakan teknik keabsahan data yang dimana peneliti melakukan rekapitulasi dan audit data selama penelitian berlangsung serta melakukan bimbingan terhadap dosen pembimbing dan mencatat hasil bimbingan dan lampiran surat-surat terkait penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses dari penyusunan data yang diperoleh dari kegiatan penelitian secara sistematis dan terorganisir yang dimana

menghasilkan sebuah kesimpulan untuk memberikan pemahaman bagi diri sendiri dan oleh orang lain. Dalam teorinya Sugiyono (2017) memaparkan bahwa analisis data merupakan proses untuk memperoleh data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih bagian yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis interaktif yang dipaparkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Komponen-komponen analisis data tersebut tergambar sebagai berikut:



Gambar 1.3 Komponen dalam analisis data (Interactive model)

(Sumber: Miles et al, 2014)

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu model analisis secara interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al (2014). Maka dari itu berikut ini merupakan beberapa komponen yang menjadi alur kegiatan analisis data, yaitu:

a. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan sebuah data terkait dengan topik penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan proses wawancara dengan pihak-pihak narasumber yang dilakukan menggunakan alat perekam maupun catatan penelitian, dokumentasi terkait Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak SMP di Kota Malang, serta dokumentasi kegiatan pengumpulan berkas, data ataupun gambar yang memungkinkan dalam menunjang penelitian ini. Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni langsung mendatangi ke obyek penelitian di SMP Negeri 2 Malang dengan menemui Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Malang dan koordinator KIP di SMP Negeri 2 Malang, selanjutnya mendatangi salah satu siswa yang mendapatkan fasilitas KIP di SMP Negeri 2 Malang beserta orang tua nya

b. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data atau proses pemilahan data, merupakan proses penyederhanaan dari data mentah yang di peroleh dalam kegiatan penelitian terkait Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak SMP di Kota Malang yang selanjutnya data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi tersebut ditelaah dengan pemilihan, pemusatan, serta penyederhanaan data yang sesuai fokus dari penelitian ini.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan penyusunan dari keseluruhan data-data maupun informasi-informasi yang telah dianalisis dan disajikan secara sistematis guna memungkinkan dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data bisa berupa uraian singkat, bagan, flowchat, ataupun sejenisnya untuk mendukung hasil analisis dan penarikan kesimpulan penelitian Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak SMP di Kota Malang.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan bagian terakhir dalam kegiatan analisis. Pada prosesnya peneliti menarik sebuah kesimpulan berdasarkan data dan didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data yang mencakup fokus dari penelitian, sehingga dengan adanya penarikan kesimpulan telah menjawab secara keseluruhan atas hasil penelitian mengenai Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak SMP di Kota Malang.